



Dewan Setujui LPJ APBD TA 2018

Sejumlah Rekomendasi Disampaikan Legislatif

SAMBAS - DPRD Kabupaten Sambas menerima pertanggungjawaban penggunaan APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Sambas. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ir H Arifidiar MH saat rapat paripurna, Kamis (25/7). Disampaikan Arifidiar, persetujuan DPRD Sambas setelah dirinya yang memimpin paripurna meminta secara lisan persetujuan Anggota legislative yang hadir dalam rapat paripurna.

Permintaan persetujuan secara lisan tersebut dilakukan Badan Anggaran DPRD Sambas terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, kemudian meminta persetujuan secara lisan ang-



PIMPIN SIDANG: Ketua DPRD Sambas Ir H Arifidiar MH memimpin sidang paripurna bersama wakil ketua. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah.

ggota DPRD Sambas atau raperda tersebut, dilanjutkan dengan pendapat akhir Bupati Sambas, kata politisi Golkar ini. Menurutnya, apa yang disampaikan Badan Anggaran DPRD Sambas, merupakan hasil pembahasan yang dilaksanakan maksimal oleh Banggar DPRD

Sambas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Sambas, Ni Ketut Indrawati menyebutkan ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan setelah Badan Anggaran membahas bersama TAPD serta pendapat dari Fraksi-fraksi di DPRD Sambas.

Diantaranya seperti yang disampaikan dari Fraksi Golkar. Atas diperolehnya opini WTP oleh Pemkab Sambas. Masih memberikan ruang bagi legislative untuk mempertanyakan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan ke DPRD Sambas. Diantaranya, masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. Diantaranya ada kesalahan penambahan dalam belanja daerah yang melekat pada tiga Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. "Serta masih ditemukan ketidakpatuhan dengan Undang Undang yang berlaku

dalam pengelolaan keuangan daerah yakni pertanggungjawaban belanja hibah barang yang diserahkan ke pihak ketiga atau masyarakat. Termasuk realisasi belanja tak terduga, dianggap tidak tepat, dan ini harus dapat dijelaskan tegas dan transparan kepada public," kata Ni Ketut Indrawati.

Kemudian rekomendasi lainnya, ke depan, PAD harus menjadi perhatian serius Pemkab Sambas untuk ditingkatkan. Agar bisa menjadi pendongkrak percepatan pembangunan. Selanjutnya, mengenai aset tanah yang dimiliki Pemkab Sambas, segera mungkin diurus sertifikatnya, demi kepastian hukum. DPRD Sambas juga memberikan rekomendasi dalam belanja modal, Pemkab harus ada upaya penghematan, dan itu (penghematan tersebut) untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka mendukung sektor perekonomian masyarakat (fah).